

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

Semester II Tahun Anggaran 2023

KATA PENGANTAR


Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, Januari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,

Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Keuangan dan Barang Milik
Negara

MARCHEL W. HUWAE, S.H.
NIP. 198105032006041002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	iv-v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5-11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	12-18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	19-30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31-35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36-39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	40-43
VI. Lampiran dan Daftar	x

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MALUKU**
JL. Sultan babullan No. 17-18, Ambon
TELEPON 0911-352803

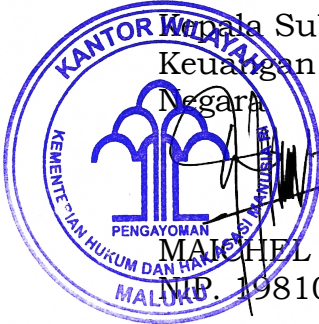
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, Januari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran,

Kepala Sub Bagian Pengelolaan
Keuangan dan Barang Milik
Negara



MAICHEL W. HUWAE, S.H.
NIP. 198105032006041002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.044.100 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.1.812.969.056 atau mencapai 98.75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.839.200.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.280.000., yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 3.280.000.; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.0

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0, dan Rp. 3.280.000.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 1.813.586.056 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 1.813.586.056 Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 21.044.100 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 1.792.541.956.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. 1.792.541.956 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 1.792.541.956 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 3.280.000.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	Th 2023			Th 2022	
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Di Bawah)	%	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	B.1					
Pendapatan negara Bukan Pajak	B.1		21,044,100			
Jumlah Pendapatan dan Hibah		-	21,044,100	21,044,100	#DIV/0!	-
Belanja	B.2					
Belanja Pegawai	B.3					
Belanja Barang	B.4	1,839,200,000	1,812,969,056	(26,230,944)	98.57	1,638,187,361
Belanja Modal	B.5					
Belanja Bantuan Sosial	B.6					
Jumlah Belanja		1,839,200,000	1,812,969,056	(26,230,944)	98.57	1,638,187,361

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.1.5	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.1.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Pendek	C.1.8	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.1.9	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.1.10	-	-
Persediaan	C.1.10	3,280,000	-
JUMLAH ASET LANCAR		3,280,000	-
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	-	-
Peralatan dan Mesin	C.2.2	-	-
Gedung dan Bangunan	C.2.3	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	-	-
JUMLAH ASET TETAP		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG	C.3		
Piutang Tagihan Tuntutan	C.3.1	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.3.2	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.3.3	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.3.3	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	-
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	-	-
Aset Lain-Lain	C.4.2	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.3	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		3,280,000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5		
Uang Muka dari KPPN	C.5.1	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.2	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.5.3	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.5.4	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.7	3,280,000	-
JUMLAH EKUITAS		3,280,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,280,000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	617,000	43,196,771
Beban Barang dan Jasa	D.4	670,063,967	476,978,000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1,142,905,089	1,118,012,590
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1,813,586,056	1,638,187,361
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1,813,586,056)	(1,638,187,361)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Beban Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		21,044,100	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		21,044,100	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1,792,541,956)	(1,638,187,361)
POS LUAR BIASA			
D.12			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
JUMLAH POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1,792,541,956)	(1,638,187,361)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR AKUNTANSI BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1,792,541,956)	(1,638,187,361)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3		
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
JUMLAH KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	1,792,541,956	1,638,187,361
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		3,280,000	-
EKUITAS AKHIR	E.6	3,280,000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Sultan Babullah No. 17-18, Kota Ambon.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkomitmen dengan misi "**mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.**" Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan

Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Akuntansi Bogor adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.839.200.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas DIPA Awal Satuan Kerja Kantor Akuntansi yang disebabkan adanya *Refocussing*, penghematan belanja pemerintah serta realokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNB		
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang	1.839.200.000	1.839.200.000
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	1.839.200.000	1.839.200.000

Realisasi
Pendapatan
Rp21.044.100

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku terdiri dari Pendapatan dari Penjualan dan Pengelolaan BMN, Pendapatan Pendidikan dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	

Pendapatan Pendidikan	0	0	
Pendapatan Lain-lain	0	21.044.100	0
Jumlah	0	21.044.100	0

Realisasi Pendapatan TA 2023 ada kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 202. Hal ini disebabkan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku pendapatan lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang lalu atas pembayaran temuan BPK Tahun 2018 yang baru diselesaikan pada tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, luran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN			
Pendapatan Pendidikan			
Pendapatan Lain-lain	21.044.100	0	0
Jumlah	21.044.100	0	0

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Rp 1.812.969.056

Realisasi Belanja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.812.969.056 atau 98,75% dari anggaran belanja sebesar Rp. 1.839.200.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	1,839,200,000	1,812,969,056	98.574
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja Kotor	1,839,200,000	1,812,969,056	98.574
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	
Jumlah	1,839,200,000	1,812,969,056	98.574

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar 10,67 persen dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya Belanja Barang akibat dari meningkatnya anggaran awal belanja barang.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	1,812,969,056	1,638,187,361	10.67
Belanja Modal			
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah	1,812,969,056	1,638,187,361	10.67

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
Rp0*

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS			
Belanja Honorarium			
Belanja Lembur			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai			
Jumlah Belanja	0	0	0

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp 1.812.969.056*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.812.969.056 dan Rp. 1.638.187.361. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami peningkatan 10,67% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Peningkatan Belanja Barang Non Operasional berupa Belanja Bahan guna menunjang berlangsungnya kegiatan,

2. Peningkatan Belanja Jasa, berupa Belanja Sewa untuk sewa ruangan dan sewa kendaraan guna menunjang berlangsungnya kegiatan,
3. Peningkatan Belanja Jasa Profesi, berupa pembayaran honor narasumber eksternal dan moderator eksternal untuk kegiatan,
4. Peningkatan Belanja Jasa Profesi Lainnya, karena adanya pembayaran jasa penyelenggaraan helpdesk layanan AHU,
5. Peningkatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, baik Perjalanan Dinas Biasa, Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang disebabkan karena meningkatnya pagu anggaran pada tahun berjalan,

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	REALISASI 2023	REALISASI 2022	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Belanja Bahan	180,344,500	133,344,000	35.25
Belanja Honor Output Kegiatan	258,462,500	265,100,000	(2.50)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	400,000	0	#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	22,787,076	(100.00)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19		20,409,695	(100.00)
Belanja Sewa	62,239,000	34,240,000	81.77
Belanja Jasa Profesi	45,200,000	41,600,000	8.65
Belanja Jasa Lainnya	123,417,967	-	#DIV/0!
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	2,694,000	(100.00)
Belanja Pemeliharaan	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Biasa	1,016,005,089	995,392,590	2.07
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,350,000	29,550,000	36.55
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86,550,000	93,070,000	(7.01)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	
Jumlah Belanja Kotor	1,812,969,056	1,638,187,361	10.67
Pengembalian Belanja Barang	-	-	
Jumlah Belanja	1,812,969,056	1,638,187,361	10.67

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp0 Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Belanja Modal Lainnya			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022 karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal tanah.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Tanah			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp0. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
--------	----------------	----------------	---

Komputer Unit			
A.C Split			
Meja dan Kursi			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0 Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Renovasi Gedung Kantor			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran yang digunakan untuk belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Modal Jaringan			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp0 Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang			
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar
Rp3.280.000

Jumlah Aset Lancar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.280.000 dan Rp0. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri No. Rek 8100124088931000	-	-
Jumlah	-	-

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	-	-
Bank Mandiri No. Rek XXX	-	-
Jumlah	-	-

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak
Rp0

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNB	-	-
Piutang Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
Rp0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
	Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
	Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Akuntansi Bogor per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Pendek
(dalam rupiah)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	0	-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	0	-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-	0	-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	0	-

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka
Rp0

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan
Rp3.280.000

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.280.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	3,280,000	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	3,280,000	-

Aset Tetap
Rp0

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp0

Tanah yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Ravaluasi Aset	
Penghapusan	
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1		-	-
2		-	-
3			
4			
5			
Jumlah			-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan Mesin
Rp0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	
Hibah	
Transfer Masuk	
Koreksi Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	
Penghapusan	
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rp0

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung	
Mutasi kurang:	
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp0

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	
Saldo Per 30 Juni 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	
Nilai Buku Per 30 Juni 2023	-

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)*

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	-
-	
Mutasi kurang:	
-	
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp0

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin			
2.	Gedung dan Bangunan			
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan			
4.	Aset Tetap Lainnya			
	Jumlah	0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Piutang Jangka
Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
-----	--------	------------	------------

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	Jumlah	0	0

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA untuk masing-masing debitor adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Jumlah	0	0

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

*Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk.
Panjang
TA 2023*

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar		0,5%	
Kurang Lancar		10%	
Diragukan	-	50%	-

Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0	0	0

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Akuntansi Bogor terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp0

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Saldo Per 31 Desember 2023	
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.	Aplikasi Penatausahaan PNBPN	
2.	Aplikasi Akuntansi Terpadu	
	Jumlah	0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain
Rp0

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	
Saldo Per 31 Desember 2023	
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023
(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.				
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah			
	Total			

Kewajiban Jangka Pendek Rp30.000.000

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	
2.	Potongan Pajak yang belum disetor	
3.	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	
	Total	

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka Rp0

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah
Jumlah	

Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah		

Ekuitas Rp30.000.000

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp30.000.000 dan Rp0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP Rp0*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN			
Pendapatan Pendidikan			
Pendapatan Lain-lain			
Jumlah			

D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp0*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Gaji			
Beban Tunjangan-tunjangan			
Beban Honorarium dan Vakasi			
Beban Lembur			
Jumlah Beban			

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp617.000*

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp617.000 dan Rp43.196.771. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Barang Persediaan Konsumsi	617,000	43,196,771	99
Barang Persediaan untuk Tujuan Strategis	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya			
Jumlah	617,000	43,196,771	99

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp670.063.967

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp670.063.967 dan 476.978.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Bahan	180,344,500	133,344,000	35.25
Beban Honor Output Kegiatan	259,100,000	268,500,000	(3.50)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(637,500)	(3,400,000)	(81.25)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	400,000	0	#DIV/0!
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	#DIV/0!
Beban Sewa	62,239,000	34,240,000	81.77
Beban Jasa Profesi	45,200,000	41,600,000	8.65
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	2,694,000	(100.00)
Beban Jasa Lainnya	123,417,967	0	#DIV/0!
Jumlah	670,063,967	476,978,000	40.48

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp0

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan			
Jumlah Beban			

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp1.142.905.089

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.142.905.089 dan Rp1.118.012.590. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun dan adanya pelatihan dari Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Perjalanan Biasa	1,018,624,489	995,392,590	2.33
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	(2,619,400)	0	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	40,350,000	29,550,000	36.55
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	86,550,000	93,070,000	(7.01)
Jumlah	1,142,905,089	1,118,012,590	2.23

Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan pelaporan. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda			
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial – dalam bentuk Uang			
Jumlah Beban			

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar			

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Non Lancar			
Jumlah Beban			

Kegiatan Non Operasional Rp0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Penjualan Alat Kantor			
Selisih Kurs			
Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah Beban			

Pos Luar Biasa Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp0*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit LO
Rp1.792.541.956*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp1.792.541.956 dan Rp1.638.187.361. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp0

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel xx
Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023*

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	
2.	Suku Cadang	
Jumlah		

Selisih Revaluasi Aset Rp0

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp0*

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	

E.5. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp1.795.821.956

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.795.821.956 dan Rp1.638.187.361.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel xx
Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(21,044,100)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,812,969,056
Transfer Masuk	3,897,000
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	1,795,821,956

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 21.044100 sedangkan DKEL sebesar 1.812.969.056.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel xx
Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Berbagai Kertas	Dietjen AHU	3.897.000
2.			
Jumlah			3.897.000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 yang merupakan transfer Persediaan ke Balai Pelatihan Akuntansi.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2023.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel xx
Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.			
2.			
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Per Satker Tahun 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Ekuitas Akhir
Rp3.280.000

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp3.280.000 dan Rp0.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1 Pengungkapan Lain-lain

- **Laporan Kinerja Pada Program Dipa AHU adalah sebagai berikut :**

1. Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran Belanja sebesar Rp.1.839.200.000 dengan Realisasi sebesar Rp.1.812.969.056 mencapai 98.75 persen;
2. Layanan MPW, MPD dan MKN Notaris pada Kantor Wilayah Maluku Target Kinerja dengan Anggaran sebesar Rp.467.388.000 dengan Realisasi Rp.462.996.310 mencapai 99.06 persen;
3. Capaian nilai IKPA berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) samapi dengan bulan Desember 2023 mencapai 93.11 persen;
4. Capaian Output pada bulan Desember 2023 senilai 100 persen, hal ini memberikan informasi bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu sesuai dengan target realisasinya;
5. Detail akun Laporan Realisasi Anggaran pada aplikasi ANDALAKU yang perlu didetailkan seperti:
 - a. Akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp.21.044.100 berupa pengembalian atas pemeriksaan PDTT BPK LK 2018 atas perjalanan dinas;
 - b. Akun Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp.637.500 atas pengembalian honorarium MPDN karena ada anggota yang sudah masuk masa purnabhakti.

- **Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023**

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor:

W.28-28.KU.02.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pengolah Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (**H. M ANWAR N, S.Sos., M.H.**)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (**MOKSEN HASAN, S.H., M.H.**)
3. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (**TOPAN SOPUAN, S.Sos., S.H., M.H.**)
4. Bendahara Pengeluaran (**MAICHEL WILLIAM HUWAE, S.H.**)
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu (**ADYSTI DWITANTRI, S.E.**)

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-13.KU.02.03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (**HENDRO TRI PRASETYO, S.H.**)

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Nomor: W.28-621.KU.02.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun Anggaran 2023 mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (**Dra. THORTJIE M. MATAHERU, S.H., M.H.**)

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-28.KP.03.03 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengangkat Kepala Divisi Administrasi (**SLAMET PRAMOEDJI, S.P., M.Si.**) selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

- **Konsep Temuan BPK 2018.**

Pada tahun 2018 Kanwil Maluku Khususnya DIPA Program AHU di Perikas oleh BPK dan terdapat Konsep Temuan BPK dengan surat Nomor : 10/PDPTT-AHU/08/2018 perihal Penyampaian Konsep TP dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Realisasi belanja perjalanan dinas pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp25.918.103.**

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas transaksi perjalanan dinas diketahui beberapa dokumen yang menunjukkan pembayaran hotel dan sewa transport lokal melebihi standar yang ditetapkan, pembayaran uang transport untuk biaya penginapan dan dokumen pertanggungjawaban tiket transport yang tidak memadai sebesar Rp23.444.100, dengan uraian sebagai berikut.

- a. Kelebihan pembayaran hotel sebesar Rp2.617.000;
- b. Kelebihan pembayaran sewa transport lokal sebesar Rp5.340.000;
- c. Pembayaran uang transport untuk biaya penginapan sebesar Rp2.400.000;
- d. Dokumen pertanggungjawaban tiket pesawat tidak memadai sebesar Rp.13.087.100;
- e. Perjalanan dinas tidak dilaksanakan sesuai ketentuan senilai Rp2.474.003.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, dan arahan dari Unit Eselon I Ditjen AHU yang sudah ditindaklanjuti dan dilakukan penyetoran ke negara sebagai berikut:

- a. Kelebihan pembayaran hotel sebesar Rp2.617.000, sudah dilakukan penyetoran ke negara pada tanggal

26 Juli 2023 dengan nomor NTPN 9584E61QUQQQLQAU;

- b. Kelebihan pembayaran sewa transport lokal sebesar Rp5.340.000, sudah dilakukan penyetoran ke negara pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan nomor NTPN 0B1A01JNFM16459F;
- c. Dokumen pertanggungjawaban tiket pesawat tidak memadai sebesar Rp.13.087.100, sudah dilakukan penyetoran ke negara secara bertahap pada tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor NTPN D36056U8ELRIRR9F dan pada tanggal 27 Desember 2023 dengan nomor NTPN 10F9B0N9VRRF8BCS;

Atas setoran ke negara tersebut, maka akan muncul Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar nilai Rp21.044.100 pada Laporan Realisasi Anggaran.

- **Penggunaan Rekening Satker**

Pada tahun 2020 Kementerian Keuangan telah Mengeluarkan Peraturan tentang pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga. Atas hal tersebut Direktorat Jenderal AHU selaku Wilayah dari Kantor Wilayah Maluku telah melakukan Surat Permohonan Persetujuan Perubahan Rekening Satker kepada Kementerian Keuangan dan mendapat Surat Persetujuan Perubahan Rekening Satker **Nomor.S-1065/WPB.12/KP.05/2020 Tanggal 08 Juni 2020**. Dan Penggunaan Rekening Pengeluaran pada satuan kerja Kantor Wilayah Maluku Program DIPA AHU telah melakukan Pemindahbukuan dan penutupan Rekening Giro ke Rekening Virtual dengan **Nomor.S-616/PB.3/2021 Tanggal 30 Maret 2021** untuk perpindahan saldo dari Rekening Giro ke Rekening Virtual telah dilakukan.